

# Table of Contents

---

1. PK KABAG PDOS KPU PROV NTT TAHUN 2021	2
2. PK KABAG HTH KPU PROV NTT TAHUN 2021	5
3. PK KABAG KUL KPU PROV NTT TAHUN 2021	8



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustinus Y. O. Paon, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos  
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. SEKRETARIS KPU PROVINSI NTT,

Yosef Hardi Himan, S.Sos

Kupang, 1 Maret 2021  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA,  
ORGANISASI DAN SDM

Agustinus Y. O. Paon, S.Sos, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<b>A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>				
1	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	1 Dok
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Sistem Informasi	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	80%
		Terwujudnya penerapan <i>e-government</i> di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
			Persentase penegakan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	2 orang
		Terlaksananya layanan pengadaan PNS secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Terlaksananya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian secara akurat	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 426.216.000
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rp. 311.290.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 737.506.000</b>

PIHAK KEDUA  
Pit. SEKRETARIS KPU PROVINSI NTT,



Yosef Harli Himan, S.Sos

Kupang, 1 Maret 2021  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA,  
ORGANISASI DAN SDM

Agustinus Y. O. Paon, S.Sos, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Thomas Dohu, S.Hut, M.Si  
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
KETUA KPU PROVINSI NTT,  
  
  
Thomas Dohu, S.Hut, M.Si

Kupang, 1 Maret 2021  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN  
HUPMAS  
  
  
Yosef Hardi Himan, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<b>B Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>				
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 Kab/ Kota
			Terlaksananya pendidikan pemilih di daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	3 Keg

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Rp. 86.407.000
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 159.874.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 246.281.000</b>

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA KPU PROVINSI NTT,**



**Thomas Dohu, S.Hut, M.Si**

**Kupang, 1 Maret 2021**  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN**  
**HUPMAS**



**Yosef Hardi Himan, S.Sos**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Arfaksad Lau, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yosef Hardi Himan, S.Sos  
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selaku atasan **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
Plt. SEKRETARIS KPU PROVINSI NTT,

Yosef Hardi Himan, S.Sos

Kupang, 1 Maret 2021  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM  
DAN LOGISTIK

Simon Arfaksad Lau, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<b>A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>				
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
3	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3
4	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Rp. 4.601.443.000
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Rp. 54.550.000
3.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarans Prasarana	Rp. 797.167.000
4.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretareiat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Rp. 48.286.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.501.446.000</b>

PIHAK KEDUA  
 PTL SEKRETARIS KPU PROVINSI NTT,



Yosef Hardi Himan, S.Sos

Kupang, 1 Maret 2020  
 PIHAK PERTAMA  
 KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM  
 DAN LOGISTIK

Simon Arfaksad Lau, SH